



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Pancaningrum
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Politik Dalam Negeri
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadlansyah Lubis
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang
Politik Dalam Negeri

ttd.

ttd.

Fadlansyah Lubis

Dyah Pancaningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	
1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	Rp.957.560.000,00
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	Rp.98.640.000,00

3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri Rp.43.800.000,00

Total Anggaran

Rp.1.100.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri

ttd.

ttd.

Fadlansyah Lubis

Dyah Pancaningrum



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Beben Hurmansyah
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadlansyah Lubis
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara

ttd.

ttd.

Fadlansyah Lubis

R. Beben Hurmansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
DAN APARATUR NEGARA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (77)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	
1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Rp.651.298.000,00
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Rp.51.652.000,00
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Rp.8.200.000,00
4. Penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.281.850.000,00
Total Anggaran	Rp.993.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara

ttd.

Fadlansyah Lubis

ttd.

R. Beben Hurmansyah



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johar Arifin

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadlansyah Lubis

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan

ttd.

Fadlansyah Lubis

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Hubungan
Internasional

ttd.

Johar Arifin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	
1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	Rp.533.967.000,00
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional	Rp.93.140.000,00

3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional Rp.466.903.000,00

Total Anggaran Rp.1.093.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
hubungan internasional

ttd.

ttd.

Fadlansyah Lubis

Johar Arifin



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadlansyah Lubis
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

ttd.

Fadlansyah Lubis

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang
Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi, dan Informatika

ttd.

Edwin Jeffry Herald Wuisang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	
1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp.877.308.000,00
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp.46.892.000,00
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp.15.800.000,00
Total Anggaran	Rp.940.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

ttd.

ttd.

Fadlansyah Lubis

Edwin Jeffry Herald Wuisang



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha

ttd.

ttd.

Agustina Murbaningsih

Diana Irawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN
MODAL DAN BADAN USAHA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal dan badan usaha yang yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	Rp 791.053.500,00
2. Penyusunan Rekomendasi terkait Permohonan	Rp 127.780.500,00

Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha

3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha Rp 71.166.000,00

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha

Total Anggaran Rp 990.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

ttd.

Agustina Murbaningsih

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan
Badan Usaha

ttd.

Diana Irawati



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan,
dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih
Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

ttd.

ttd.

Agustina Murbaningsih

Roby Arya Brata

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN,
KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (78)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	
1. Penyusunan Rekomendasi rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp 811.000.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 85.412.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp 43.888.000,00
4. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp 229.700.000,00
Total Anggaran	Rp1.170.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

ttd.

Agustina Murbaningsih

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

ttd.

Roby Arya Brata



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muis

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur,
Pengembangan Wilayah, dan Industri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perekonomian

ttd.

Agustina Murbaningsih

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan
Wilayah, dan Industri

ttd.

Abdul Muis

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR,
PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penyusunan Rekomendasi rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri | Rp 833.011.000,00 |
|---|-------------------|

2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.53.766.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.103.223.000,00
Total Anggaran	Rp.990.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

ttd.

Agustina Murbaningsih

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,
dan Industri

ttd.

Abdul Muis



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian,
Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang
Ketahanan Pangan, Pertanian,
Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

ttd.

ttd.

Agustina Murbaningsih

Ida Dwi Nilasari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN,
LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

Kegiatan

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

Anggaran

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

Rp.895.548.000,00

2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.71.220.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.23.232.000,00
Total Anggaran	Rp.990.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

ttd.

Agustina Murbaningsih

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Ketahanan Pangan, Pertanian,
Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

ttd.

Ida Dwi Nilasari



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda,
dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso
Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

ttd.

Surat Indrijarso

ttd.

Teguh Supriyadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA,
DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga

Rp.732.481.000,00

- | | |
|---|--------------------------|
| 2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga | Rp.202.331.000,00 |
| 3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga | Rp.55.188.000,00 |
| Total Anggaran | Rp.990.000.000,00 |

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

ttd.

Surat Indrijarso

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Agama, Kesehatan, Pemuda, dan
Olahraga

ttd.

Teguh Supriyadi



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Suranto
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

ttd.

Surat Indrijarso

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Herman Suranto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (78)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Rp.599.364.000,00
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Rp.600.000.000,00
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Rp.600.000.000,00
4. Penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.279.436.000,00
Total Anggaran	Rp.880.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

ttd.

Surat Indrijarso

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

ttd.

Herman Suranto



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

ttd.

Surat Indrijarso

ttd.

Endang Tri Septa Kurniawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN,
PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rp.504.757.000,00
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rp.119.375.000,00
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rp.250.868.000,00
Total Anggaran	Rp.875.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

ttd.

Surat Indrijarso

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

ttd.

Endang Tri Septa Kurniawati



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Kadarwati
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

ttd.

Surat Indrijarso

ttd.

Rahayu Kadarwati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Rp.192.468.000,00
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Rp.132.517.000,00
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Rp.555.015.000,00
Total Anggaran	Rp.880.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

ttd.

Surat Indrijarso

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

ttd.

Rahayu Kadarwati



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Kusumastuti

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,

Deputy Bidang Kemaritiman

ttd.

Satya Bhakti Parikesit

Pihak Pertama,

Asisten Deputy Bidang
Kelautan dan Perikanan

ttd.

Dyah Kusumastuti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | Rp.889.822.000,00 |
| 2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan | Rp.31.962.000,00 |

3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan Rp.28.216.000,00

Total Anggaran

Rp.950.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Kelautan dan Perikanan

ttd.

ttd.

Satya Bhakti Parikesit

Dyah Kusumastuti



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Hamidi

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman

ttd.

Satya Bhakti Parikesit

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral

ttd.

Mohammad Hamidi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (77)
		2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.992.853.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi terkait Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.13.430.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.62.471.000,00
4. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman	Rp.113.256.000,00
Total Anggaran	Rp.1.182.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

ttd.

Satya Bhakti Parikesit

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral,

ttd.

Mohammad Hamidi



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafruddin

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Perhubungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,

Deputy Bidang Kemaritiman

ttd.

Satya Bhakti Parikesit

Pihak Pertama,

Asisten Deputy Bidang Perhubungan

ttd.

Syafruddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Rp.621.130.000,00

2. Penyusunan Rekomendasi terkait Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan

Rp.113.912.000,00

3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan Rp.214.958.000,00

Total Anggaran Rp.950.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

ttd.

Satya Bhakti Parikesit

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan

ttd.

Syafruddin



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman

ttd.

Satya Bhakti Parikesit

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Kepariwisata,
Riset dan Teknologi, dan
Lingkungan Maritim

ttd.

Mohamad Arief Khumaidi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim

Rp.745.089.000,00

2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Rp.110.807.000,00
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Rp.94.104.000,00
Total Anggaran	Rp.950.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata,
Riset dan Teknologi, dan
Lingkungan Maritim

ttd.

Satya Bhakti Parikesit

ttd.

Mohamad Arief Khumaidi



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sjahriati Rochmah

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Penyelenggaraan Persidangan

ttd.

Yuli Harsono

ttd.

Sjahriati Rochmah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terselenggaranya Persidangan Kabinet yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	100%
		2. Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-bahan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp.4.000.000.000,00
Layanan Penyiapan Sidang Kabinet	
Total	Rp.4.000.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Penyelenggaraan Persidangan

ttd.

ttd.

Yuli Harsono

Sjahriati Rochmah



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Priyantono

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Pelaporan Persidangan

ttd.

ttd.

Yuli Harsono

Heru Priyantono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Sidang Kabinet yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil sidang kabinet	100%
		2. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet	100%
		3. Persentase Arahan Presiden (APRES) pada sidang kabinet dan rapat terbatas yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (70)
		2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1. Transkripsi sidang kabinet

Rp.610.571.000,00

2. Rancangan risalah sidang kabinet serta Arahan Presiden (APRES) pada sidang kabinet Rp.1.389.429.000,00

Total Anggaran Rp.2.000.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Pelaporan Persidangan

ttd.

ttd.

Yuli Harsono

Heru Priyantono



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Harnowo

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang
Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Naskah
dan Terjemahan

ttd.

Yuli Harsono

ttd.

Eko Harnowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%
2.	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	1. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%
		2. Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan	
1. Naskah kepresidenan	Rp.413.637.000,00
2. Dokumen terjemahan	Rp.199.890.000,00
3. Layanan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp.2.386.473.000,00
Total Anggaran	Rp.3.000.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang
Naskah dan Terjemahan

ttd.

ttd.

Yuli Harsono

Eko Harnowo



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Furkon Setiawan

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang
Dukungan Kerja Kabinet

ttd.

Yuli Harsono

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Hubungan
Masyarakat dan Protokol

ttd.

Al Furkon Setiawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
	Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100%
		2. Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat, pertemuan atau kegiatan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	
1. Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi	Rp.1.552.191.000,00
2. Layanan Protokoler	Rp.1.447.809.000,00
Total Anggaran	Rp.3.000.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol

ttd.

ttd.

Yuli Harsono

Al Furkon Setiawan



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Islachuddin

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Administrasi

ttd.

Farid Utomo

Pihak Pertama,

Kepala Biro Perencanaan
dan Keuangan

ttd.

Islachuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%
		2. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0
3.	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pengoordinasian Penyusunan, Penelaahan, dan Pembahasan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran | Rp.446.769.000,00 |
| 2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun Berjalan di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp.680.937.000,00 |
| 3. Pengoordinasian, Penelaahan, Pembahasan, Penyusunan Revisi DIPA dan POK DIPA | Rp.139.000.000,00 |

4. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pelayanan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran, serta Penyelesaian Kerugian Negara	Rp.275.000.000,00
5. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp.735.000.000,00
Total Anggaran	Rp.2.276.706.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

ttd.

ttd.

Farid Utomo

Islachuddin



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari

Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan
Tata Laksana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

ttd.

Farid Utomo

ttd.

Ratih Mayangsari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN
TATA LAKSANA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%
		2. Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%
		3. Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%
2.	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	1. Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%
		2. Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Pegawai, serta Pengkajian dan Penyusunan Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Perencanaan dan informasi kepegawaian | Rp.225.686.000,00 |
| 2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian/pensiun pegawai | Rp.131.178.000,00 |
| 3. Administrasi kenaikan pangkat pegawai | Rp.63.330.000,00 |
| 4. Dukungan teknis dan administrasi penyiapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi madya dan/atau jabatan pimpinan tinggi utama | Rp.1.192.898.000,00 |
| 5. Perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas pegawai | Rp.3.502.920.000,00 |

6. Pembinaan pegawai	Rp.37.298.000,00
7. Pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan	Rp.549.290.000,00
Total Anggaran	Rp.5.702.600.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

ttd.

ttd.

Farid Utomo

Ratih Mayangsari



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulyati Kristina

Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

ttd.

Farid Utomo

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja
dan Reformasi Birokrasi

ttd.

Yulyati Kristina

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO AKUNTABILITAS KINERJA
DAN REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Jumlah unit kedeputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "BB"	4 Unit Kerja
		2. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	85%
		3. Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	4 Komponen
		4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	80%
2.	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Layanan Persuratan serta Ketatausahaan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	75%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu, Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp.162.900.000,00 |
| 2. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu | Rp.42.300.000,00 |
| 3. Pengembangan sistem manajemen kinerja | Rp.331.833.000,00 |
| 4. Perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp.184.340.000,00 |

5. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp.141.980.000,00
6. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp.155.315.000,00
7. Dukungan pelayanan teknis dan administrasi ketatausahaan dan persuratan	Rp.562.493.000,00
Total Anggaran	Rp.1.581.161.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja
dan Reformasi Birokrasi

ttd.

Farid Utomo

ttd.

Yulyati Kristina



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Temon
Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum

ttd.

Farid Utomo

ttd.

Temon

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO UMUM**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan	90%
		2. Persentase akurasi laporan Barang Milik Negara (BMN)	100%
		3. Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	90%

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan dan administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan barang, bangunan, kendaraan, alat pengolah data, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet

1. Layanan Internal	Rp.4.559.818.000,00
2. Layanan Manajemen Barang Milik Negara	Rp.761.732.000,00
3. Layanan Umum	Rp.2.506.802.000,00
4. Layanan Perkantoran	Rp.24.491.280.000,00
Total Anggaran	Rp.32.319.632.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum

ttd.

ttd.

Farid Utomo

Temon



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Gunawan

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Inspektur

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Wawan Gunawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	87%
		2. Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit
		3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	30 April 2017
		4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2

Kegiatan

Anggaran

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet

- | | |
|---|------------------|
| 1. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal | Rp42.000.000,00 |
| 2. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, <i>Reviu</i> , Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya | Rp696.709.000,00 |
| 3. Pelaporan Hasil Pengawasan | Rp89.100.000,00 |
| 4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | Rp106.100.000,00 |

5. Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja,
Pengawasan, serta Pendokumentasian Laporan
Hasil Pemeriksaan Rp316.091.000,00

Total Anggaran Rp1.250.000.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Inspektur

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Wawan Gunawan



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwanto

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Suwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	80%
		2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	70%
		3. Jumlah pengunjung data dan informasi pada <i>website</i> Sekretariat Kabinet	360.000 pengunjung
		4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	90%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan	
1. Penyelenggaraan dukungan manajemen data	Rp702.656.000,00
2. Penyelenggaraan dukungan teknologi informasi	Rp7.307.566.000,00
3. Penyelenggaraan dukungan kearsipan dan perpustakaan	Rp423.158.000,00
Total Anggaran	Rp8.433.380.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Pramono Anung

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi

ttd.

Suwanto